

“AUDIT SEKTOR PUBLIK SEBAGAI ISU UTAMA UNTUK MEREALISASIKAN GOOD GOVERNANCE”

Lasminar Lusia Sihombing^{1*}, Redempta Elfrida Panjaitan²
Politeknik Bisnis Indonesia

Email : minarlusia@gmail.com^{1*}, redemptapanjaitan@gmail.com²

Published: Juli 2026

ABSTRAK

Negara seharusnya melaksanakan apa yang menjadi tuntutan yang signifikan, transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat dalam mengelola keuangan negara, sehingga terjadi perubahan reformasi dari birokrasi yang sudah ada dan sedang berjalan dalam ranah pemerintahan. Penelitian ini berfungsi dalam menganalisis peran strategis audit sektor publik sebagai instrumen utama untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kepustakaan (*literature review*), dengan menganalisa regulasi-regulasi, teori akuntansi sektor publik dan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian ini menjelaskan bahwa audit sektor publik mencakup audit tentang keuangan, kinerja, audit untuk tujuan tertentu, bukan sekedar formalitas, tetapi pilar krusial dalam mendeteksi pemberantasan korupsi, transparansi anggaran, ekonomis, efisiensi dan efektivitas untuk sumber daya yang ada dengan cara objektif, independen dengan menghadapi berbagai tantangan, seperti auditor yang memiliki kompetensi yang terbatas, bagian politik yang ikut mengintervensi, dan realisasi dari kenyataan yang terjadi serta kelemahan dalam menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP). Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), auditor, pemerintah, masyarakat harus sama-sama memiliki sinergi yang kuat, sehingga esensi dari good governance dapat terlaksana dengan cara optimal.

Kata Kunci : Audit Sektor Publik, *Good Governance*, Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja atau Tata Kelola Pemerintah.

ABSTRACT

The state ought to address significant public demands for transparency and accountability in the management of state finances, thereby driving bureaucratic reform within the government sector. This study analyzes the strategic role of public sector auditing as a key instrument for implementing good governance. A descriptive qualitative method was employed, utilizing a literature review approach to analyze relevant regulations, public sector accounting theories, and prior research. The study demonstrates that public sector auditing—encompassing financial, performance, and special-purpose audits—is not merely a formality but a crucial pillar in combating corruption and ensuring budget transparency, as well as the economical, efficient, and effective use of resources. This role is carried out objectively and independently, despite facing various challenges such as limited auditor competence, political interference, operational realities, and weaknesses in following up on audit recommendations. The study concludes that the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), auditors, the government, and the public must foster strong synergy to ensure the essence of good governance is optimally realized.

Keywords : *Public Sector Audit, Good Governance, Accountability, Transparency, Performance or Government Governance.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai instansi resmi harus memperhatikan apa yang dituntut oleh masyarakat terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas dari instansi atau lembaga pemerintahan. Masyarakat di era millenial atau modern ini tidak lagi pasif melainkan lebih aktif mengawasi kinerja pemerintahan, supaya setiap rupiah yang dikeluarkan untuk keperluan publik harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, benar, tepat, akurat dan jelas. Hal ini merupakan fenomena yang menekankan dasar atau konsep dari realisasi *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) sangat penting dalam berbagai lini sektor publik. Tata Kelola Pemerintahan yang baik atau *good governance* bukan hanya tren birokrasi, melainkan kebutuhan yang signifikan, supaya tercapai pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Realisasi pelaksanaan *good governance* memiliki tantangan yang besar, seperti sistem pengawasan yang lemah dan resiko yang tinggi dari kesalahan manajemen (*mismanagement*) keuangan negara, maka peran Audit sektor publik sangat krusial dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, evaluasi kinerja untuk menentukan dan membuktikan serta melihat program yang dilakukan pemerintah apakah sudah berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Identifikasi Masalah

Audit sektor publik harus diakui memiliki dampak yang sangat signifikan, tetapi dalam praktiknya sering ditemukan masalah-masalah, seperti :

- **Independensi Auditor** : Intervensi atau tekanan politik dari instansi yang diaudit sangat mempengaruhi objektivitas dari hasil audit.
- **Kualitas dan Tindak Lanjut Hasil Audit**: Instansi yang berkaitan dengan hal ini bisa mempengaruhi kecepatan eksekusi, apabila tidak cepat ditindaklanjuti bahkan diabaikan.
- **Rendahnya Komitmen Akuntabilitas**: Laporan keuangan yang dikerjakan secara formalitas, belum sepenuhnya sesuai dengan orientasi dari transparansi substantif. Hal ini menunjukkan bahwa audit sektor publik berubah dari isu teknis akuntansi menjadi **isu utama dan strategis** yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam merealisasikan *good governance*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan mendasar akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh audit sektor publik secara strategis untuk mendorong, supaya realisasi dari prinsip-prinsip *good governance* dapat diciptakan?
2. Apa tantangan-tantangan utama yang harus dihadapi dalam melaksanakan audit sektor publik untuk saat ini?
3. Bagaimana solusi memaksimalkan fungsi audit, supaya bisa menjadi katalisator atau pemicu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel?

Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- Menganalisis hal-hal yang mendesak atau *urgent* atas audit sektor publik sebagai pilar utama *good governance*.
- Mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk melaksanakan implementasi audit yang efektif pada lembaga pemerintahan.
- Merumuskan rekomendasi strategis, supaya tercipta fungsi audit yang kuat dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga pemerintahan.

Metode yang digunakan dalam pendahuluan ini adalah metode *deduktif* (segitiga terbalik) yang diawali dari gambaran umum mengenai tuntutan masyarakat dan *good governance*, kemudian mengerucut terhadap peran penting audit sektor publik, dan akhirnya masuk ke masalah spesifik yang dibahas.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur (literature review) mengenai "**Audit Sektor Publik sebagai Isu Utama untuk Merealisasikan Good Governance**" difokuskan dalam hal bagaimana kinerja dan pengawasan keuangan lembaga pemerintahan yang merupakan pilar krusial dapat tercipta lewat tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kerangka tinjauan literatur secara komprehensif, terstruktur dan siap dikembangkan untuk karya ilmiah atau jurnal, adalah sebagai berikut :

TINJUAN LITERATUR

1. Pembentukan Konsep *Good Governance* dalam Sektor Publik

United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan definisi dari tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, yaitu pelaksanaan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan negara di semua tingkatan. Ada 3 (tiga) pilar utama sektor publik yang saling berhubungan, yaitu :

- **Transparansi** : Pemerintah harus terbuka atau jelas dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sumber daya publik yang dikelola.
- **Akuntabilitas** : Pemerintah atau pengelola wajib menginformasikan kepada rakyat mengenai dana-dana yang digunakan untuk kepentingan publik dengan penuh tanggungjawab.
- **Partisipasi dan Penegakan Hukum** : Masyarakat diharapkan patuh dan terlibat serta melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan cara yang adil dan benar.

2. Kapasitas atau Peran Strategis dalam Audit Sektor Publik

Audit sektor publik termasuk isu utama yang signifikan dalam mewujudkan *good governance*. *Auditing* merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Definisi *Auditing* adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Arens & Loebbecke, 2002), sedangkan Definisi Audit Sektor Publik adalah suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan sektor publik.

Kegiatan audit sektor publik meliputi perencanaan, pengendalian, pengumpulan data, pemberian opini dan pelaporan, jadi tidak hanya melakukan pemeriksaan pada akuntansi, tetapi melakukan instrumen evaluasi independen terhadap lembaga pemerintah. Teori agensi (*Agency Theory*), menjelaskan bahwa pemerintah bertindak sebagai *agent* (agen) yang mengelola dana dari rakyat selaku *principal* (prinsipal). Konflik kepentingan (*asymmetric information*) dapat terjadi karena agen memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal.

Hal ini yang memicu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Indonesia memiliki peran sebagai pihak ketiga yang independen dalam menjembatani kesenjangan yang terjadi melalui tiga jenis audit utama, yaitu :

Jenis Audit	Fokus Utama	Kontribusi terhadap Good Governance
Audit Keuangan	Menilai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	Menutup celah manipulasi anggaran dan meningkatkan transparansi .
Audit Kinerja (3E)	Mengukur tingkat Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas penggunaan anggaran.	Memastikan dana publik memberikan dampak riil bagi masyarakat (akuntabilitas).
Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)	Pemeriksaan khusus termasuk audit investigatif terhadap indikasi kecurangan (<i>fraud</i>).	Mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

3. Isu Utama (Linkage ke *Good Governance*) dalam Audit Sektor Publik

Audit adalah isu utama yang ditempatkan literatur komtemporer, karena pengawasan yang berkualitas dapat menentukan tata kelola pemerintahan yang bersifat efektif (efektivitas). Hubungan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pelaksanaan kegiatan untuk memberantas korupsi dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien atau boros, akibat kerusakan/inefisiensi (Sistemik)** : Audit yang ketat mempersempit ruang gerak tindakan koruptif. Temuan audit (seperti kerugian negara) menjadi basis data bagi aparat penegak hukum.
- **Public Trust** atau **kepercayaan publik harus ditingkatkan** : Ketika opini audit sebuah lembaga pemerintah berkategori baik (misalnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP), kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah akan meningkat.
- **Pelayanan kepada publik harus diperbaiki supaya lebih bermutu** : Audit kinerja mendorong instansi pemerintah untuk tidak hanya menghabiskan anggaran (*output-oriented*), tetapi juga memastikan hasil tersebut bermanfaat bagi masyarakat (*outcome-oriented*).

4. Realisasi Hambatan atau Tantangan dalam Audit Sektor Publik

Inti dari *good governance*, secara teori adalah audit, tetapi tantangan besar yang terjadi secara praktek biasanya digunakan dalam berbagai penelitian :

- **Auditor harus memiliki Independensi** : Hasil audit secara objektif bisa terpengaruh karena adanya tekanan politik atau kedekatan antara auditor dan auditee.

- **Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit (TLRHP) :** Temuan-Temuan Audit atau Finding Matter harus memiliki kualitas, kuantitas dan integritas serta tidak hanya sebagai dokumen diatas kertas dan pemerintah seharusnya memiliki komitmen untuk memperbaiki diri dan tidak menjadi lemah.
- **Kapasitas harus dimiliki oleh Sumber Daya Manusia atau SDM :** Kurangnya jumlah auditor yang kompeten dalam menghadapi modus korupsi modern (seperti *cyber-fraud* dalam e-government).

5. Kesimpulan Tinjauan Literatur

Sintesis dari berbagai literatur menunjukkan bahwa **Audit Sektor Publik adalah katalisator utama dalam merealisasikan *good governance***. Audit yang tidak berfungsi secara independen, objektif, memiliki integritas, maka prinsip transparansi dan akuntabilitas hanya akan menjadi jargon politik. *Good governance* akan berhasil dicapai, jika hasil audit tidak hanya fokus pada opini yang diberikan atas laporan keuangan, akan tetapi pemerintah harus memiliki komitmen penuh dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan.

KESIMPULAN

Pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa kegiatan audit sektor publik tidak hanya kewajiban secara administratif, tetapi isu utama dan instrumen krusial dalam merealisasikan *good governance*. Audit yang dilakukan secara independen, objektif, transparan dapat menekan atau mengurangi tingkat penyalahgunaan wewenang, meminimalisasi praktik korupsi, serta memastikan bahwa alokasi anggaran publik digunakan secara efektif, efisien, dan ekonomis (*value for money*). Tata kelola pemerintahan yang bersih jika hendak berhasil diwujudkan, tergantung pada kualitas hasil audit dan komitmen aparatur sipil dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh lembaga auditor.

Saran

1. **Independensi Auditor harus lebih kuat :** Politik atau pihak luar harus dihindari dengan cara mendorong Lembaga audit sektor publik, supaya independensi dan profesionalisme dapat terjaga.
2. **Teknologi Informasi harus dimanfaatkan :** Akselerasi dalam penerapan *e-audit* (audit berbasis digital) sangat diperlukan untuk meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi proses audit di era modern.
3. **Pembuat Kebijakan harus memiliki ketegasan dalam tindak lanjut :** Sanksi harus diberikan secara tegas oleh pemerintah atau instansi terkait, kemudian melakukan evaluasi berkala atas temuan audit yang tidak segera ditindaklanjuti oleh satuan kerja

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Indra Bastian, Ph.D., MBA., CA, CMA, Mediator. (2018). Edisi 3. *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Jakarta Salemba Empat.

Dr. St. Dwiarto Utomo, S.E., M.Kom., Ak., C.A, E. Suhartono, S.Kom., M.Kom. (2018). *PENGAUDITAN Pengolahan Data Elektronik (PDE)*. Jakarta Salemba Empat.

Arifin, J. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntabilitas dan Kontrol Publik*. Erlangga. Bastian, I. (2018). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Edisi 3). Salemba Empat. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.

Prasetyo, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Audit Sektor Publik dan Pengendalian Intern terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Pemerintah*, 4(1), 25–38.

Suryo, H. (2020). Akuntabilitas Publik dan Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mendorong Transparansi Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(2), 115–130.

United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP Policy Document.

Yusuf, M. (2023). Tantangan dan Isu Strategis Audit Sektor Publik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 15(3), 210–225.

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Halim, Abdul, & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. (2014). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hughes, O. E. (2018). *Public Management and Administration: An Introduction*. London: Palgrave Macmillan.

Jurnal Ilmiah (Indonesia & Internasional)

- Adriani, N., & Wahyudi, I. (2019). Pengaruh Audit Sektor Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Pelaksanaan *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 45-58.
- Dwiputrianti, S. (2011). Memahami Efektivitas Audit Sektor Publik dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan *Good Governance*. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(2), 115-128.
- Funnell, W., & Cooper, K. (2012). *Public Sector Accounting and Accountability in Australia*. UNSW Press.
- Hay, D., & Corderly, C. (2018). The Value of Public Sector Audit: Literature and History. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 30(2), 211-227.
- Rahayu, S., & Sholihin, M. (2021). Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Mendorong Terwujudnya *Good Governance* di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 6(1), 12-25.

Regulasi, Standar, dan Dokumen Resmi

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (2026). *Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*. Jakarta: BPK RI.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Jakarta.
- United Nations. (2020). *Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens*. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.